



## Problematika Pendidikan Berbasis Teknologi Digital di Era *Post-Truth* dan Urgensi Pendidikan Moral

Pedro A.P. Babys <sup>a,1</sup>, Oktovianus Yudha Pramana <sup>b,2</sup>

<sup>a, b</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

<sup>1</sup> [pedrobabis1@gmail.com](mailto:pedrobabis1@gmail.com)

<sup>2</sup> [o.m.yudapramana@gmail.com](mailto:o.m.yudapramana@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted: July 22, 2025

Revised: September 5, 2025

Accepted: September 15, 2025

#### Keywords:

Education; Digital Technology; Post-Truth; Moral Philosophy and Moral Education

#### Kata-kata Kunci:

Pendidikan; Teknologi Digital; Post-Truth; Filsafat Moral dan Pendidikan Moral

#### DOI:

<https://doi.org/10.53396/media.v6i2.632>

### ABSTRACT:

This article aims to analyze the problems of digital technology-based education in the *post-truth* era from the perspective of moral philosophy and to highlight the urgency of moral education in fostering students' ethical awareness. The study employs a qualitative method using a literature review and descriptive-analytical approach to relevant works on educational digitalization, moral philosophy, and the *post-truth* phenomenon. The findings indicate that while digitalization seeks to enhance educational access, it has also generated moral challenges such as the decline of critical thinking, technological dependency, and the rise of plagiarism caused by instant mentality and *post-truth* cognitive bias. These conditions give rise to "digital unconsciousness," a weakening of ethical awareness in technology use. The paper argues that character education alone is insufficient because it promotes moral habituation without critical reflection. Moral philosophy provides a normative and critical framework—through inductive, deductive, and reflective methods—to ethically evaluate human actions. In conclusion, moral education grounded in moral philosophy is essential to cultivate rational awareness, ethical responsibility, and digital citizenship with integrity amid the challenges of the *post-truth* era.

### ABSTRAK:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika pendidikan berbasis teknologi digital di era *post-truth* dari perspektif filsafat moral serta menunjukkan urgensi pendidikan moral dalam membentuk kesadaran etis peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif terhadap literatur yang relevan mengenai digitalisasi pendidikan, filsafat moral, dan fenomena *post-truth*. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi, yang

awalnya dimaksudkan untuk mempermudah akses pendidikan, justru menimbulkan berbagai persoalan moral seperti hilangnya daya berpikir kritis, ketergantungan terhadap teknologi, dan meningkatnya praktik plagiarisme akibat mentalitas instan serta bias kognitif *post-truth*. Kondisi ini menyebabkan munculnya "ketidaksadaran digital," yaitu melemahnya kesadaran etis dalam menggunakan teknologi. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan karakter saja tidak cukup, sebab hanya menumbuhkan kebiasaan moral tanpa refleksi kritis. Filsafat moral menawarkan kerangka analisis normatif dan kritis melalui metode induktif, deduktif, dan reflektif untuk menilai tindakan manusia secara etis. Kesimpulannya, pendidikan moral berbasis filsafat moral menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran rasional, tanggung jawab etis, serta kemampuan peserta didik menjadi warga digital yang berintegritas di tengah tantangan era *post-truth*.

Copyright ©2025, Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa manusia pada babak baru yang disebut sebagai era digital. Di sini, pemahaman mendasar tentang konsep digital merujuk pada aktivitas ‘menggunakan jari’ (*digitus*). Melalui teknologi ini, manusia dapat ‘berselancar mengelilingi dunia’ hanya dengan meng-*click*, sehingga aktivitas ‘menggunakan jari’ paling dominan dilakukan oleh manusia. Salah satu refleksi komprehensif dari Budi Hardiman tentang “sosok” manusia modern ditampilkan dalam konsep Homo Digitalis yang dikemukakan oleh Rafael Capurro dalam bukunya *Homo Digitalis Beiträge zur Ontologie, Anthropologie und Ethik der Digitalen Technik*. Memang, sangat menarik Hardiman memberikan penekanan khusus terhadap model peradaban masa kini; sebuah peralihan evolusioner dari manusia sebagai makhluk yang cerdas homo sapiens menuju pada manusia ‘berjari’ *homo digitalis*.<sup>1</sup> Model peralihan ini menggambarkan paradoksnya cara berada manusia (*having*).

Dalam konteks dunia pendidikan, muncul problem-problem empirik yang juga bersifat paradoksal. Di satu sisi, dunia digital menyediakan ruang akseibilitas yang ‘tinggi’ kepada para peserta didik agar menggali sumber-sumber yang terkait dengan materi pembelajaran. Selain itu, dunia digital juga menjadi wadah dalam pengembangan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Di sisi lain, banyak praktik kecurangan yang datang karena berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh dunia digital, sehingga muncul problem-problem: penumpukan informasi yang tidak terverifikasi,<sup>2</sup> munculnya tawaran-tawaran joki karya tulis yang tidak mendidik, berkembangnya kecerdasan buatan dalam platform yang membuat pesera didik terperjara dalam mentalitas *instant*,<sup>3</sup> menjalarnya tindakan plagiarisme dalam dunia Pendidikan dan lain-lain. Problem-problem di atas, tidak serta merta dipahami sebagai ‘kekurangan dari perkembangan teknologi’ melainkan juga “keterbatasan SDM” dari gen Z sebagai subjek yang menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, dalam tahap ini orang mulai mengagas tesis atas dasar karakter, moral, etika, kesucilaan, tata cara, metode dan lain-lain dalam memecahkan masalah tersebut; asumsi umum mengatakan bahwa, peserta didik kehilangan visi terhadap nilai-nilai moral yang mengakibatkan mereka mengalami degradasi moral.

---

<sup>1</sup>F. Budi Hardiman, "Aku Klik maka Aku Ada Manusia dalam Revolusi Digital," (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

<sup>2</sup>Penumpukan informasi atau *Information Overload* menjadi bagian dari perkembangan teknologi mutakhir yang dengan paradigma ‘semua sudah tersedia.’ Penumpukan informasi tanpa verifikasi yang jelas menjerumuskan peserta didik dalam *fake news, fake information* yang umumnya bersifat *boax*. Dalam persoalan empirik, peserta didik menemukan banyak materi pembelajar dengan berbagai sumber yang semakin variatif tanpa landasan sifat ilmiah, memuat konspirasi palsu yang tidak mempunyai bobot keilmuan. Beberapa hal tersebut menjerumuskan peserta didik dalam *boax-learning*.

<sup>3</sup>Selain itu, perkembangan teknologi mutakhir AI dan kecerdasan buatan lainnya seperti *Chat-GPT* ini menjerumuskan peserta didik dalam mentalitas *instant* (*Searching, Copying* dan *Pasting* dalam dunia Pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa, dengan kehadiran kecerdasan buatan, pengguna (*user*) seolah-olah dipersiapkan menjadi *The Criminal User of Digital-Technology*.

Untuk mengantisipasi itu, kebanyakan peneliti mengarahkan perhatian pada paradigma dunia pedagogik yakni Pendidikan Karakter (*Character Building*). Sebagaimana Dwi Noviani, dkk dalam artikel yang berjudul: *Sosialisasi Urgensi Pendidikan Karakter Terhadap Remaja Millenial Generasi Z di Era Society 5.0*, menjelaskan tentang konsep Pendidikan karakter sebagai upaya untuk menciptakan generasi muda (Gen Z) sebagai agen transformasi nilai-nilai luhur dari perkembangan teknologi.<sup>4</sup> Selain itu, Grendi Hendrasutomo dan Nur Endah Januarti dalam artikel yang berjudul: *The Characteristics of Generation Z Students and Implications for Future Learning Methods*, membahas lebih spesifik tentang karakter peserta didik era dan implikasinya dalam metode pembelajaran yang berbasis digital.<sup>5</sup>

Kedua penelitian tersebut mengangkat persoalan penggunaan teknologi digital dengan mengarahkan fokus pada Gen Z, sebagai aktor teknologi digital. Gen Z juga disebut sebagai *the native user of digital technology* dalam kedua penelitian tersebut. Betapapun demikian, ada perbedaan cara pendekatan dalam kedua penelitian ini. Penelitian pertama menggunakan pendekatan sosiologis atau sosialisasi terhadap peserta didik yang diklasifikasikan kedalam Gen Z. Sedangkan penelitian kedua menggunakan pendekatan analisis aktor, atau analisis kepribadian Gen Z yang berimplikasi pada penerapan metode pembelajaran yang relevan. Noviani, dkk berpendapat bahwa, pendidikan karakter telah menjadi bagian dari agenda UU 1964 hingga UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, namun faktanya pendidikan karakter belum secara efisien meningkatkan kesadaran peserta didik.<sup>6</sup> Lebih lanjut, Hendrastomo dan Januarti berpendapat bahwa, Gen Z yang *notabene* kelahiran generasi tahun 2000-an disebut sebagai *the native user of digital technology* atau pengguna ‘asli’ teknologi digital justru tidak berkompeten dalam penggunaannya. Oleh karena itu, perlu adanya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter, agar Gen Z menjadi pengguna yang berkompeten.<sup>7</sup>

Bertolak dari latar belakang dan tinjauan literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan pendidikan berbasis teknologi digital dan menawarkan filsafat moral sebagai pisau bedah dalam mengatasi ‘hilangnya kesadaran’ dari peserta didik sebagai pengguna aktif teknologi digital. Hilangnya kesadaran yang dimaksudkan adalah ‘melemahnya daya kritis’ peserta didik. Melemahnya daya kritis peserta didik pertama-tama disebabkan oleh ‘ketergantungan terhadap teknologi’ secara khusus kecerdasan buatan. Hilangnya kesadaran juga

---

<sup>4</sup>Dwi Noviani et al., “Sosialisasi Urgensi Pendidikan Karakter Terhadap Remaja Millenial Generasi Z di Era Society 5.0,” *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 119-124.

<sup>5</sup>Grendi Hendrastomo dan Nur Endah Januarti, “The Characteristics of Generation Z Students and Implications for Future Learning Methods,” *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 9, no. 2 (2023): 484-496.

<sup>6</sup>Noviani et al., “Sosialisasi Urgensi Pendidikan Karakter Terhadap Remaja Millenial Generasi Z di Era Society 5.0.”

<sup>7</sup>Hendrastomo dan Januarti, “The Characteristics of Generation Z Students and Implications for Future Learning Methods.”

dipahami sebagai metafor baru yang membuka ruang diskursus tentang filsafat moral, secara khusus dalam hubungannya dengan perkembangan teknologi digital di era post-truth Selain itu, berkembangnya fenomena post-truth juga turut memperparah kondisi dunia pendidikan; post-truth berkembang sebagai sebuah fenomena dimana kebenaran dapat dipertukarkan dengan kebohongan; moralitas beralih menjadi immoralitas; informasi (fakta dan kebenaran) dimanipulasi menjadi komoditas yang membanjiri laman media massa. Akhirnya nalar kritis peserta didik dibajak menjadi ‘nalar instrumentalis’ (nalar dijadikan sebagai instrument memproduksi *hoax* sebanyak-banyaknya); ‘nalar ketergantungan’ (hilangnya daya kritis peserta didik) dan ‘nalar konsumtif’ (banjirnya informasi membuat peserta didik mengkonsumsi berbagai jenis informasi tanpa melibatkan daya kritis).

Di samping tujuan sentral di atas, penulisan artikel ini juga dapat membuktikan bahwa filsafat moral merupakan landasan fundamental bagi diskursus tentang tindak laku manusia. Dalam konteks kedua penelitian sebagai tinjauan literatur di atas, filsafat moral dapat menjadi pijakan untuk menguji secara kritis model pendidikan karakter yang relevan dengan konteks perkembangan teknologi digital. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa, pendidikan karakter secara otonom tidak bisa menjamin kesadaran kritis peserta didik; karena pendidikan karakter bergerak di wilayah praktis-normatif. Artinya, pendidikan karakter hanya menjamin kerangka normatif suatu tindakan, namun belum memadai secara etis karena pendidikan karakter tidak dapat menguji etis dan non-etisnya suatu tindakan secara kodrati; benar dan kelirunya suatu tindakan. Oleh karena itu, tugas filsafat moral adalah menguji secara kritis tindakan peserta didik dalam konteks digitalisasi pendidikan, menyajikan diskursus dan klarifikasi atas tindakan tersebut agar sejalan dengan prinsip-prinsip moral universal. Adapun tiga metode filsafat moral yang digunakan dan memadai secara etis adalah metode induksi, deduksi dan metode kritis.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka atau *library research*, yang mengkaji sumber literatur mengenai dengan tema-tema seputar: pendidikan berbasis teknologi digital, Pendidikan moral, *post-truth* dan Filsafat Moral. Sumber-sumber diambil dari buku-buku, artikel jurnal, situs-situs *web* dan dan media-media lainnya yang relevan dengan konteks penelitian artikel ini. Teknik penyajian dan penjabaran data menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk membahas tentang tema-tema penting dalam penelitian ini. Metode dan pendekatan ini merupakan langkah interpretasi teoritis terhadap konsep-konsep untuk menguraikan fokus penelitian yang kemudian mengerucut pada implikasi praktis.

## DISKUSI

### Digitalisasi: Akar Pendidikan Berbasis Teknologi Digital

Pembicaraan mengenai dengan periodisasi sejarah perkembangan teknologi digital tidak lepas dari konteks perkembangan teknologi secara holistik (zaman pra-sejarah di mana manusia membuat alat-alat sederhana yang membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari). Namun, poin inti perkembangan teknologi digital secara transparan dimulai pada era revolusi industri baik dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Perjalanan teknologi di panggung sejarah yang secara periodik ditandai dengan ide revolusi industri juga berkelindan dengan perjalanan diskusus dan pertentangan ide antara kaum konservatif dan kaum progresif. Secara umum, revolusi industri diperkenalkan oleh Frederich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19.<sup>8</sup> Revolusi industri, umumnya dibagi atas beberapa periode:

*Pertama*, Revolusi industri 1.0 yang terjadi di Inggris merupakan ‘tanda’ perubahan paradigma dari sistem ekonomi agraris menuju sistem ekonomi industri. Pada era ini terjadi pertentangan serius antara kaum progresif dan kaum konservatif. Bahkan muncul *Royal Society for Improving Natural Knowledge*,<sup>9</sup> sebagai daya dukung pemerintah terhadap para penemu. Revolusi industri gelombang pertama terjadi di Inggris yang merupakan hasil penemuan James Watt. Penemuan terpenting Watt pada masa ini adalah mesin uap yang mempermudah mekanisasi dalam proses produksi. Dengan demikian, proses produksi klasik yang umum dalam masyarakat agraris berupa tenaga manusia dan tenaga hewan tergerus dari masa ke masa. Tesis-tesis kaum progresif mulai bermunculan dan menambah pengaruh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara sah dalam lembaga yang memediasi peneliti seperti *Royal Society for Improving Natural Knowledge*. Sedangkan antitesis datang dari golongan-golongan kelas bawah seperti *Luddites*<sup>10</sup> dan juga gerakan-gerakan sosialisme<sup>11</sup> yang merupakan tanggapan terhadap pergeseran nilai-nilai hidup yang juga merupakan hasil dari revolusi industri.

---

<sup>8</sup>Mutiawati Fajariah dan Djoko Suryo, ‘Sejarah Revolusi Industri Di Inggris Pada Tahun 1760-1830’, *HISTORLA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 8.1 (2020), 78 <<https://doi.org/10.24127/hj.v8i1.2214>>.

<sup>9</sup>Michael Hunter, “Royal Society (of London for Improving Natural Knowledge) Summary,” *Britannica*, 2024, <https://www.britannica.com/topic/Royal-Society>.

<sup>10</sup>Lely Maulida dan Reska K. Nistanto, ‘Asal-Usul Luddite, Istilah Buat Orang Yang Anti Teknologi’, *Kompas.Com*, 2023, <<https://tekno.kompas.com/read/2023/01/16/10000017/asal-usul-luddite-istilah-buat-orang-yang-anti-teknologi>> [accessed 4 April 2024]. Istilah *Luddite* berasal dari seseorang yang bernama Ned Ludd yang merusak mesin di sebuah Pabrik di Nottingham, Inggris. Kisah ini (Ned Ludd) merupakan sebuah legenda terkenal di kalangan masyarakat Inggris. Selama Revolusi Industri berlangsung, para buruh yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena mekanisasi dan otomisasi proses produksi, kemudian memanfaatkan legenda Ned Ludd untuk menghancurkan mesin-mesin tekstil dan menyebut diri mereka sebagai *Luddites*.

<sup>11</sup>Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999). Hal 19. Revolusi Industri menciptakan situasi ‘proletariat industrial’ dan

*Kedua*, revolusi industri gelombang kedua (2.0). Revolusi gelombang ini terjadi dan meluas terutama di negara-negara koloni seperti Inggris, Perancis, Amerika, Jerman dan lain sebagainya. Revolusi tahap kedua ini merupakan hasil lonjakan budaya industrial pada revolusi gelombang pertama. Ide-ide revolusi industri 2.0 disumbang oleh golongan-golongan pendukung sistem ekonomi industri yang kemudian berdampak lebih besar pada perkembangan ideologi politik dan corak hidup sosial. Pada masa ini muncul mekanisasi produksi massal (lebih maju), secara khusus dengan kehadiran teknologi pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran.<sup>12</sup> Yang menjadi bagian menarik dan penting dalam diskursus Sejarah perkembangan revolusi industri, secara khusus pada revolusi industri gelombang kedua adalah semakin menguat ide-ide kapitalis yang merongrong kehidupan sosial dan masyarakat. Bahkan, semakin meluasnya ambisi untuk mengembangkan ekonomi, negara-negara Koloni tersebut melakukan kolonisasi dalam bidang ekonomi dan imperialisasi dalam bidang politik terhadap negara lain. Di saat itulah, ide-ide ekonomi berkelindan dengan politik yang memperluas kesenjangan dalam hidup sosial.

*Ketiga*, berkembangnya revolusi industri 3.0 di Amerika Serikat. Hal penting pada masa ini adalah munculnya teknologi komunikasi (*IT*) dan sistem komputerisasi yang bertujuan untuk menunjang proses produksi ‘super-cepat’ (*production automation*). Selain itu, perkembangan teknologi di era ini ditandai dengan berkembangnya internet yang membantu proses produksi melalui komputer induk. Ada perkembangan yang mengubah sistem hidup manusia, yakni sistem komunikasi. Pada era internet ini, sistem komunikasi bersifat ‘maya’ dan terjadi dalam jejaring sosial. Paradigma mekanisasi (revolusi industri pertama) dan produksi massa (revolusi industri gelombang kedua) diubah menjadi komputerisasi yang dikelola secara penuh melalui sistem Siber dan jaringan raksasa. Dapat dikatakan bahwa tingkat kompleksitas perkembangan teknologi digital pada era ini sangat tinggi.

*Keempat*, revolusi industri gelombang keempat (4.0). Revolusi pada tahap ini dipahami sebagai ‘penyempurnaan’ dari tiga periode besar dalam sejarah. Konsep Revolusi Industri 4.0 diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Schwab yang adalah ahli ekonomi terkenal asal Jerman, sekaligus penggagas *World Economic Forum* dalam bukunya, *The Fourth Industrial Revolution 4.0*.<sup>13</sup> Dampak universal dari Revolusi Industri 4.0 adalah, semakin

---

sosialisme adalah tanggapan terhadap perubahan-perubahan hidup. Kata sosialisme muncul di Perancis pada tahun 1830 (istilah ini sama dengan komunisme). Namun, komunisme dipakai untuk aliran sosialisme radikal.

<sup>12</sup>Bdk. Sri Anggraeni, ‘Sejarah Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0’, *Materials Performance and Characterization*, 8.3 (2019): 2.

<sup>13</sup>Delipiter Lase, ‘Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0’, *Jurnal Sunderman*, 1.1 (2020), 31. Schwab menjelaskan bahwa Revolusi Industri 4.0 mengubah kehidupan dan kerja manusia secara fundamental, karena kemajuan teknologi yang cepat dan pesat yang kemudian mengintegrasikan dimensi fisik dan virtual-digital, sehingga skala dan Tingkat kompleksitasnya sangat tinggi (mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, dan

menguatnya tuntutan disruptif dalam segala lini kehidupan. Konteks tuntutan disruptif dewasa ini dipopulerkan oleh Clayton M. Christensen dalam tulisannya yang berjudul *The Innovator's Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to Fail* (1997) dan Francis Fukuyama dalam tulisannya, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order* (1999). Walaupun demikian, ada perbedaan mendasar dari Christensen dan Fukuyama tentang disrupsi.<sup>14</sup> Sedangkan, karakter umum dari Revolusi Industri 4.0 (pasca-modernisme) yang dimulai sejak tahun 1960-an adalah penemuan komputer sebagai media Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada abad ke-21, Revolusi Industri tahap keempat ini lebih cenderung ditandai dengan adanya akses terbuka terhadap Internet. Revolusi Industri 4.0 juga dipahami sebagai bentuk Revolusi yang mengembangkan teknologi otomisasi dengan teknologi *Cyber*, sehingga dalam perkembangannya lebih lanjut menyentuh dunia virtual, konektivitas manusia dalam mesin dan data atau disebut sebagai *Internet of Things* (IoT).<sup>15</sup> Perkembangan Revolusi Industri 4.0 mencapai tingkat perkembangannya lebih lanjut dengan kemunculan konsep *Society 5.0*. Konsep ini digagas oleh negara Jepang dengan mempelajari pengetahuan dan perkembangan teknologi mutakhir (IoT), seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), komputerisasi dan juga industri robot (*robotic industrial*). Konsep ini menekankan *skill*, inovasi dan pemanfaatan teknologi. Paradigma konseptual dari ide *Society 5.0* menekankan 'pusat perkembangan teknologi adalah manusia' (*human centered*) dan basis dasarnya adalah teknologi (*technology based*)<sup>16</sup>

Sebagai lonjakan besar dari beberapa periode perkembangan teknologi di atas, kemudian mengerucut pada ide 'digitalisasi' dalam segala aspek kehidupan (digitalisasi ekonomi, digitalisasi politik, digitalisasi Pendidikan dan lain-lain). Konsep digitalisasi ini sebenarnya muncul sebagai tanggapan terhadap era disrupsi yang menuntut adanya transformasi hidup manusia, secara khusus dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam segala aspek kehidupan manusia. Sehingga, dalam pemahaman lebih lanjut, digitalisasi dipahami sebagai proses peralihan media informasi analog kepada media berbasis digital.<sup>17</sup> Ide 'digitalisasi' merupakan tuntutan dunia digital yang merupakan dampak dari arus perkembangan teknologi secara signifikan. Selain itu, digitalisasi

---

ketatanegaraan. Lih juga, Dingot H. Ismail dan Joko Nugroho, 'Kompetensi Kerja Gen Z Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.4 (2022): 1302.

<sup>14</sup>Allesandro Pinangkaan, 'Pentingnya Tahap Perencanaan Dalam Manajemen Fasilitas Pendidikan Berbasis Revolusi Industri 4.0', *Teori Dan Model Manajemen Pendidikan*, 2019, 3.

<sup>15</sup>Delipiter Lase, 31.

<sup>16</sup>Marianus Subandowo, "Teknologi Pendidikan Di Era Society 5.0," *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 9.1 (2022): 30.

<sup>17</sup>Cut Nelga Isma, Rina Rahmi, and Hanifuddin Jamin, 'Urgensi Digitalisasi Pendidikan Sekolah', *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 14.2 (2022): 133. <<https://doi.org/10.47498/tadib.v14i2.1317>>.

merupakan sintesis terhadap kerangka konseptual ide ‘digital’ yang menyejarah dalam kehidupan manusia. Dalam artian tertentu, digitalisasi menjawab tuntutan disruptif era digital untuk dalam melakukan perubahan secara mendasar dalam setiap lini kehidupan. Era *Society 5.0* merupakan tuntutan disruptif bagi manusia dalam rangka pemanfaatan inovasi teknologi sepanjang Sejarah (khususnya perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0).

Bertolak dari itu, ide digitalisasi pendidikan sebenarnya, sudah diterapkan dalam sistem pendidikan modern, sejak tahun 1960, di Illinois, Amerika Serikat. Sedangkan, kursus digitalisasi pendidikan dengan metode *daring* ditawarkan pertama kali oleh *University of Toronto*, pada tahun 1984. Setelah itu, pada tahun 1990-an, salah satu Universitas terbuka di Inggris yang pertama kali menerapkan pembelajaran jarak jauh secara *online* (*daring*).<sup>18</sup> Dengan demikian, ide digitalisasi pendidikan secara gamblang diterapkan hingga saat ini.

Lebih khusus, digitalisasi pendidikan (pendidikan berbasis digital) merupakan kerangka konseptual sekaligus agenda praktis untuk menerima inovasi dunia digital sebagai kerangka untuk mengembangkan dunia pendidikan. Digitalisasi pendidikan atau sebutan lainnya ‘teknologi pendidikan’ sudah dijelaskan oleh Yusuf, sebagaimana yang dikutip oleh Subandowo, “teknologi Pendidikan adalah suatu proses sistemik dalam membantu memecahkan masalah-masalah pembelajaran”<sup>19</sup> Pada tahap ini, digitalisasi pendidikan atau (dalam sebutan lainnya, pendidikan berbasis digital dan teknologi pendidikan) merupakan suatu keharusan karena ini merupakan bagian dari tuntutan zaman yang disebut dengan tuntutan era disruptif. Maka, bidang pembahasan tentang pendidikan berbasis teknologi digital mencakup metode-metode pembelajaran yang harus dibangun dan pemanfaatan teknologi digital sebagai media untuk men-transfer ilmu pengetahuan bagi peserta didik. Pemanfaatan teknologi digital sebagai media dalam men-transfer ilmu pengetahuan mengandaikan bahwa, pertama-tama dan yang terutama adalah teknologi digital menjamin komunikasi (*common sense*) yang baik antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, paradigma yang harus dibangun dalam model pendidikan berbasis teknologi digital adalah bagaimana teknologi digital dengan berbagai tawaran dalam setiap tingkatan perkembangannya yang mutakhir mampu memediasi pendidik dan peserta didik dan bukan menciptakan jurang pemisah antara pendidik dan peserta didik. Dan dengan demikian, digitalisasi mencakup agenda bersama dunia pedagogi dalam menerapkan komunikasi yang inklusif.

---

<sup>18</sup>Soumik Sarkar, “A Brief History of Online Education,” *Adamas University Pursue Excellence*, 2020, <https://adamasuniversity.ac.in/a-brief-history-of-online-education/>.

<sup>19</sup>Subandowo, “Teknologi Pendidikan di Era Society 5.0,” 27.

## Problematika Pendidikan Berbasis Teknologi Digital di Era Post-Truth

Fenomena *post-truth* menjadi salah satu fenomena terpenting dan inheren dengan perkembangan teknologi digital yang lebih mutakhir. Pengertian *post-truth* dalam *Oxford English Dictionary*, didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana fakta secara objektif dinilai kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, jika dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal.<sup>20</sup> Menilik penjelasan mengenai dengan pengertian *post-truth*, fenomena hidup yang demikian ini telah menjadi suatu periodisasi sejarah yang mengakar dalam sistem hidup manusia secara umum dan secara khusus melalui masuknya paradigma ruang digital. Era *post-truth* hadir untuk mendefinisikan keadaan sosial masyarakat yang memperjualbelikan ‘kebenaran’ dengan berbagai tawaran ‘receh’. Artinya, di era *post-truth*, kebenaran dapat dikomodifikasikan dan dengan masuknya paradigma ruang digital, kebenaran dikodifikasikan kedalam sistem *cyber* sehingga lebih mudah dikonsumsi oleh publik secara luas.

Stuart Sim dalam karyanya yang berjudul: *Post-truth, Scepticism and Power* mengemukakan bahwa, di balik bayang-bayang fenomen *post-truth*, bukan hanya skeptisisme manusia modern, melainkan adanya kekuatan (*power*) yang berupaya untuk menggiring opini publik pada suatu tujuan.<sup>21</sup> Situasi ini sejalan dengan pandangan Noam Chomsky yang menyatakan bahwa informasi di media hanyalah rekonstruksi tertulis atas suatu realitas di masyarakat dan rekonstruksi tersebut sangat bergantung pada aktor di balik media.<sup>22</sup> Selain itu, McIntyre, sebagaimana dikutip oleh Adzfar dan Chair, menjelaskan bahwa, *post-truth* merujuk pada kondisi di mana kebenaran terancam dan karena itu, *post-truth* menjadi satu strategi yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengontrol jaringan informasi secara luas.<sup>23</sup> Dengan demikian, *post-truth* merujuk pada fenomena sosial di mana adanya usaha untuk memprovokasi massa dengan wajah-wajah yang berpengaruh di ‘belakang layar’.

Dengan kehadiran media digital, dengan paradigmanya menjadi lahan subur untuk perkembangan fenomena *pos-truth*. Secara umum, paradigma teknologi digital yang berlandas pada kekuatan ‘jaringan raksasa’ atau *Cyber* mampu menghubungkan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam dunia yang dibentuk oleh teknologi digital, dunia ‘maya. Paradigma komunikasi turut berubah, dari korporeal menjadi inkorporeal. Apa yang disebut sebagai dunia maya menjadi ruang gema (*echo chamber*) yang mampu

---

<sup>20</sup>Zainul Adzfar and Badrul Munir Chair, "Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 9.2 (2021, hal 167) <<https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.12596>>.

<sup>21</sup>Adzfar and Chair, 168.

<sup>22</sup>Ahmad Baiduri, "Political Post-Truth: Antara Simulacra dan Prahara Digital," LSF Discourse, 2023, <https://lsfdiscourse.org/political-post-truth-antara-simulacra-dan-prahara-digital/>.

<sup>23</sup>Adzfar and Chair, 168.

menjangkiti masa, selaku pengguna dalam sistem *Cyber*. Akhirnya, kebohongan mudah direkayasa oleh *Buzzer* dalam ruang digital dan menjadi ‘kekuatan’ kebenaran; semakin banyak orang membagikan (*share*) suatu kebohongan, maka kebohongan itulah yang diklaim sebagai kebenaran, sehingga menghasilkan kebenaran performatif (*performative theory of truth*).<sup>24</sup> Situasi hidup seperti ini telah dibayangkan oleh Jean Baudrillard dalam karyanya, *Simulacra and Simulations*.<sup>25</sup> Ia menjelaskan bahwa, konstruksi imajiner manusia cenderung melahirkan ‘realitas lain’ yang disebut olehnya sebagai *hiper-reality*. Hal ini (*hiper reality*) merujuk pada kondisi dimana tanda (*signs*) dan symbol (*symbol*) yang mewakili realitas justru lebih ‘nyata’ daripada realitas itu sendiri. Artinya, dalam dunia post-modern, teknologi digital menciptakan simulasi yang perlahan-lahan menggantikan pengalaman langsung dengan realitas; dan realitas baru yang tercipta hanyalah konstruksi imajiner yang tidak menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial.<sup>26</sup> Dalam *Simulacra*-nya ia juga menjelaskan bagaimana manusia mengalami ekstasi digital yang menyebabkan manusia hidup dalam ilusi kebenaran (kebenaran yang terdistorsi oleh adanya peleburan antara fakta dan opini, kebohongan dan pencitraan). Bahkan, lebih buruk lagi jika fenomen ini berubah menjadi sebuah ‘kebiasaan’ yang kemudian membajak nalar kritis masyarakat dengan dalil ‘ketidaktahuan.’

Dalam konteks dunia pendidikan berbasis digital, muncul problem-problem serupa yang sangat beragam. Melalui teknologi digital yang semakin memperluas tingkat produksi memungkinkan terjadinya penumpukan informasi (*overload information*), tanpa verifikasi yang jelas, sekaligus memperluas tingkat konsumsi peserta didik. Pada titik ini, maka tidak dapat dibedakan antara kebenaran ilmiah dan non-kebenaran ilmiah. Salah satu kecenderungan yang sering ditemukan dalam media digital, secara khusus dalam mesin-mesin penelusuran (*search engine*) tidak bisa menyajikan dan mengklasifikasikan informasi yang sudah terverifikasi secara ilmiah dan informasi yang tidak terverifikasi secara ilmiah. Mesin penelusuran hanya ‘menyajikan’ informasi yang ditelusuri oleh pengguna sejauh yang ‘ia’ (mesin) pahami dari kodifikasi dan bahasa pemrograman. Akhirnya, *hoax* dan *fake news* menjamur di setiap laman internet. Dan peserta didik menjadi produsen sekaligus konsumen *hoax* dan *fake news* (kehilangan kesadaran bahwa ia adalah produsen dan

---

<sup>24</sup>Hardiman, 54.

<sup>25</sup>Bdk. Vinsensius R. Masut, Robertus Wijanarko, dan Pius Pandor, “Objektivikasi Subjek dalam Budaya Kontemporer berdasarkan Konsep Hiperrealitas Jean Baudrillard,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 311.

<sup>26</sup>Contoh yang menggambarkan *hiper reality* Baudliard adalah, teknologi *VR/AR* yang menggabungkan dunia digital dengan dunia nyata; *metaverse* yang menggambarkan interaksi manusia secara maya melalui avatar; dan filter media sosial yang merupakan efek *AI* untuk mengubah penampilan pengguna. Pada contoh-contoh nyata *hiper-realitas* tersebut, dapat dilihat bagaimana pengguna (subjek) kehilangan keotentikan diri dan bahkan bergeser menjadi objek. Bdk. Masut, Wijanarko, dan Pandor, 310.

konsumen *boax*). Pada titik inilah dapat ditemukan *Simulcra*-nya Baudrillard menjadi pembahasan yang relevan dalam dunia pendidikan.<sup>27</sup>

*Kedua*, menguatnya *trend* digital: *copying* dan *pasting*. Dalam dunia akademik, munculnya mentalitas *instant* yang bertolak dari paradigma ‘semua sudah tersedia’ memungkinkan banyak terjadi praktik plagiarisme. Berhubungan dengan itu pula, dengan tingkat kemajuan teknologi, ruang digital hadir dan menawarkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam *platform*, seperti *Chat GPT*, peserta didik seolah-olah dipersiapkan untuk menjadi pengguna kriminal (*the criminal user*). Artinya, dengan kehadiran *Chat GPT*, sistem plagiasi menjadi lebih komprehensif; *Chat GPT*, menyajikan informasi dalam jangkauan yang lebih luas. Di dalamnya, segala jenis informasi ditawarkan; pengguna hanya siap ‘menerima’ hasil rekapitulasi data yang ditelusuri oleh mesin cerdas tersebut. Akhirnya, peserta didik kehilangan daya berpikir dan menganggap plagiarisme sebagai hal yang ‘wajar’.

*Ketiga*, perubahan paradigma dari fungsi mediasi teknologi digital berubah menjadi komodifikasi. Di sini, para produsen informasi memproduksi informasi bukan ‘semata’ menjadi informasi (*information itself*), melainkan menjadi informasi yang dikomodifikasikan untuk tujuan-tujuan komersial. Persoalan ini juga menjadi persoalan yang sangat aktual dan kontekstual dan merupakan akibat laten dari perkembangan teknologi digital. Dalam ‘wajah’ transformasi digital, sebenarnya terselip logika komodifikasi yang bertujuan mengejar kepentingan ekonomis setinggi-tingginya. Begitupun, tugas pendidik bukan untuk mengajarkan dan mendidik melainkan menjadi promotor bagi peserta didik untuk menumbuh-kembangkan *self-skill*, *soft-skill* dalam media digital. Pembentukan *skill*, juga bukan diarahkan untuk ‘melawan’ dampak masif teknologi digital, melainkan bersifat pragmatis dan ekonomis yang bertujuan mengejar kepentingan yang bersifat ekonomis. Akhirnya, ‘nalar’ kritis berubah menjadi rasio instrumental; *homo sapiens* beralih ke *homo economicus*, di mana peserta didik menjadi manusia-manusia mekanik yang dikontrol oleh ekonomi raksasa.

*Keempat*, perubahan paradigma berpikir, dari fungsi praktis teknologi digital menjadi fungsi mutlak. Munculnya ketergantungan terhadap penggunaan teknologi digital (*internet addiction*) mengubah cara pandang pengguna terhadapnya. Salah satu fenomena dalam dunia pendidikan yang menjadi problem ‘kunci’ adalah ketergantungan terhadap internet. Dalam konteks ini, fungsi mediasi teknologi digital, sebagaimana nampak dalam metode-metode pembelajaran digital, *E-Learning* yang memaksimalkan media *massa*, media sosial dalam mentransfer ilmu pengetahuan, berubah menjadi model ‘ketergantungan’ masif

---

<sup>27</sup>Salah satu contoh, yang sering ditemukan dalam permasalahan tersebut, adalah meluasnya konspirasi palsu yang tidak memiliki bobot ilmiah dan dirancang sedemikian rupa (melibatkan emosi yang berlebihan) untuk menarik perhatian pembaca. Kecenderungan ini secara umum, berangkat dari persoalan-persoalan yang sensitif secara emosional.

dan membuka ruang berkembangnya *free-learning*. Dalam kapasitas seperti ini, peserta didik dapat mempelajari ‘apa saja’ yang sejauh ‘ia kehendaki’, sehingga terjadi pergeseran antara konsep ‘pendidikan yang bertujuan untuk mendidik’ dan konsep pendidikan yang bertujuan untuk sekedar mengajarkan. Akhirnya, peran guru dalam dunia pendidikan bukan lagi menjadi peran sentral, melainkan peran formal yang berlaku pada waktu proses pembelajaran saja; setiap orang dapat mengakses materi pembelajaran secara bebas tanpa pembimbingan guru sebagai mentor dan rekan belajar. Secara implisit, ketergantungan terhadap internet, merupakan kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran bahwa ia ‘sedang’ dikontrol secara emosional-adiktif oleh teknologi.

Akibat yang muncul dari problem-problem tersebut tentu membajak nalar kritis peserta didik dan mengubah cara pandang, baik menyangkut fungsi, penggunaan, metode, kedudukan teknologi digital dalam dunia -pendidikan. Isi ringkasnya, dapat ditemukan pergeseran paradigma berpikir, sekaligus pergeseran dari kesadaran untuk berpikir kritis menuju ‘ketidaksadaran’ yang inheren dengan mentalitas *instant*. Bahaya yang muncul dari ketidaksadaran ini menuju suatu pembiasaan mengakar dan kemudian menjadi suatu habitus yang tentu saja buruk. Psikologi mendefinisikan *post-truth* sebagai ‘bias kognitif.’ Dalam konteks dunia pendidikan dan teknologi digital, bias kognitif mempengaruhi cara pandang peserta didik dalam melihat fungsi, peran dan kedudukan teknologi digital dalam dunia pendidikan. Fenomena seperti: penumpukan informasi (yang tidak terverifikasi secara ilmiah), plagiarisme, komodifikasi dunia pendidikan, ketergantungan terhadap internet dan lain sebagainya merupakan bias kognitif yang menyebabkan peserta didik tanpa sadar mempraktekannya sebagai kebiasaan yang normal dan lazim dalam dunia pendidikan era sekarang ini. jika diklasifikasikan, dapat ditemukan model bias kognitif yang disebut sebagai efek Dunning-Kruger yang diperkenalkan oleh psikolog yang bernama David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999.<sup>28</sup>

Efek ini mengandaikan bahwa, peserta didik mampu mengidentifikasi diri sebagai pengguna teknologi digital yang kompeten secara etis, namun dalam kenyataannya mereka justru terperosok dalam jurang berdigital yang immoral. Mengikuti pembahasan dari A. Setyo Wibowo, ia menanggapi Efek psikologis “Dunning-Kruger” dalam konteks dunia pendidikan dengan menulis:

---

<sup>28</sup>Efek Dunning-Kruger ini dijelaskan pertama kali dalam sebuah penelitian, pada tahun 1999 yang berjudul: “Tidak Terampil dan Tidak Menyadarinya: Bagaimana Kesulitan dalam Mengenali Ketidakmampuan Seseorang Menyebabkan Penilaian Diri yang Meningkatkan.” Adam Hayes, “Dunning-Kruger Effect: Meaning and Examples in Finance,” Investopedia, 2023, <https://www.investopedia.com/dunning-kruger-effect-7368715>.

“Di depan fenomena Post-Truth, di mana orang menggunakan kebohongan dengan memanfaatkan psikologi manusia, kadang orang berharap bahwa dunia universitas dengan kaum akademikusnya bisa menjadi penjaga gawang kevarasan rasio. Benarkah?”<sup>29</sup>

Artinya, kondisi dunia pendidikan yang melandasi basis metodis dari teknologi digital yang juga mengalami tingkat kompleksitasnya yang cukup tinggi di era *post-truth* menjadikan dunia pendidikan sebagai ‘bangkai’ inkubasi di mana problematika era *post-truth* tampak secara ‘telanjang’ dan berkembang biak menjadi model kebiasaan baru. Apakah yang disebut sebagai digitalisasi pendidikan adalah pergeseran paradigma, pergeseran kesadaran menuju ketidaksadaran dan krisis rasionalisme?

### Risalah Filsafat Moral Sebagai Titik Referensi Bagi Pendidikan Moral

Filsafat moral adalah filsafat praktis yang mempelajari tentang perbuatan manusia dari segi ‘kebaikan’ dan ‘keburukan’ dan mencakup aspek tujuan tertinggi manusia. Dengan demikian, objek dari filsafat moral adalah moralitas. Secara khusus, objek formal dari moral adalah segala jenis tindakan yang terjadi dalam kontrol individu sebagai subjek *Actus humanus*.<sup>30</sup> Sedangkan Poespoprodjo mendefinisikan filsafat moral sebagai sebagai, ilmu filsafat praktis dan bersifat normatif tentang ‘kebenaran’ dan ‘kesalahan’ perbuatan manusia yang dapat diketahui oleh akal budi.<sup>31</sup> Filsafat moral adalah sebutan lain dari disiplin ilmu etika. Kata etika secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, sifat, watak dan tindakan manusia.<sup>32</sup> Muncul pertanyaan: apakah penting, filsafat moral menjadi rujukan kunci bagi pendidikan moral? Sebagai jawabannya, pendidikan moral pertama-tama harus mengacu pada diskursus filsafat moral yang *notabene* secara radikal-kritis menggunakan metode filsafat. Selain itu, filsafat moral juga menjelaskan nilai-nilai yang terhubung dengan keyakinan deskriptif, seperti hipotesis ilmiah tentang psikologi manusia.<sup>33</sup> Ini mengartikan bahwa, nilai-nilai filsafat moral dan asumsi filosofisnya tentang karakter, psikologi manusia dapat dipelajari sebagai bagian dalam pendidikan moral. Untuk

---

<sup>29</sup>Cara Kerja Ilmu Filsafat Dan Filsafat Ilmu Dari Dialektika Ke Dekonstruksi, ed. by A. Setyo Wibowo (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023): 300. Pertanyaan inimumuat kemungkinan munculnya bahaya-bahaya yang mengancam dunia pendidikan: krisis rasio yang seharusnya menjadi alat tulen pendidikan yang beriklim akademik dan anggota-anggotanya adalah *Civitas Academica*.

<sup>30</sup>A. Setiardja Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1990): 91. Bdk. K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani Dari Thales ke Aristoteles* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1999).

<sup>31</sup>W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusaan Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: PT Pustaka Grafika, 1999): 32

<sup>32</sup>Ida Bagus P. Adnyana, ‘Filsafat Moral: Disequilibrium Citra Dan Realita Etika Masyarakat Indonesia (Studi Fenomenologi Penggunaan Media Sosial Instagram)’, *Sanjivani: Jurnal Filsafat*, 12.2 (2021), 161. <<https://doi.org/10.25078/sjfv12i2.2625>>.

<sup>33</sup>Hugh Breakey, “Why Moral Education should Involve Moral Philosophy,” *The Conversation*, 2014, <https://theconversation.com/why-moral-education-should-involve-moral-philosophy-31675>.

itu, ada beberapa ajaran (risalah) dalam filsafat moral yang sangat urgen untuk mendalami persoalan yang sedang dialami oleh dunia pendidikan ini:

*Pertama*, risalah filsafat moral dari segi metode. Umumnya, metode filsafat moral ada dua, yakni metode deduktif (*apriori*) yang bertolak dari prinsip-prinsip dan aksioma, kemudian mengarah pada penerapan dan, metode induktif (*a posteriori*) yang bertitik tolak pada realitas dan pengalaman empirik, kemudian membuat observasi dan klasifikasi.<sup>34</sup> Asumsi umum terhadap filsafat moral mengatakan bahwa metodenya cenderung mengabaikan pengalaman empirik dan bertolak dari pandangan-pandangan metafisik. Sekiranya, metode filsafat moral bertitik tolak dari soal-soal metafisik yang kemudian memunculkan prinsip-prinsip moral. Dari prinsip moral, dapat ditemukan implikasi dan penerapannya dalam berbagai situasi hidup manusia (bukan merupakan utopia murni).<sup>35</sup> Betapapun demikian halnya, sebagai cabang filsafat, maka filsafat moral menerapkan metode kritis untuk menguji apakah suatu tindakan dapat baik atau bernilai; suatu norma dapat menjamin kebaikan bersama, ataukah kebaikan partikular; dan tentunya menguji nilai yang dianut oleh secara individual atau kolektif, apakah sejalan dengan prinsip moral universal ataukah justru bertentangan. Metode kritis melekat dalam sifat dari filsafat ilmu. Oleh karena moralitas dibicarakan dari perspektif filsafat (filsafat moral), maka metode kritis menjadi bagian vital yang tidak dapat diabaikan. Melalui metode kritis, selalu muncul kebaruan (*novelty*) ide dan gagasan tentang suatu konsep; misalnya muncul suatu tesis menuntut pula tanggapan berupa antitesis; dan hasil dari diskursus itu kemudian melahirkan suatu kebaruan (sintesis) yang adalah tesis baru. Dapat dipahami bahwa, melalui metode kritis, pandangan tentang ide, konsep atau gagasan tertentu tidak pernah final, justru melahirkan diskursus yang lebih mendalam. Dengan demikian, metode kritis digunakan untuk melengkapi dua jenis metode tersebut (induksi dan deduksi). Ketiga jenis metode tersebut dapat diterapkan dalam model pendidikan moral, sehingga secara etis, pendidikan moral dikatakan memadai. Lebih lanjut, suatu pendekatan metodis dikatakan memadai jika memuat diskursus metodis-ilmiah, kemudian diuji melalui metode kritis dan kemudian diaplikasikan secara praktis.

*Kedua*, dari segi sifat universalitasnya. Filsafat moral juga bersifat universal, mencakup gagasan-gagasan universal tentang hakikat manusia secara universal; melingkupi aspek humanitas manusia. Ini tentu saja menolak tesis-tesis yang beranggapan bahwa moral mempunyai jangkauan dan batasan-batasan tertentu (Kultur dan Kebudayaan, batasan ruang dan teritori dan sebagainya), yang juga mempengaruhi pandangan tentang moral. Hal ini

---

<sup>34</sup>Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesuksesan dalam Teori dan Praktek*, 31.

<sup>35</sup>W. Poespoprodjo, 31

sejalan dengan pandangan dari Lowie, Goldenwiser, Paul Radin, William Schmid, Westermarck, Boas, Evans Pritchard, Malinowski dan lain-lain, yang tiba pada kesimpulan:

*“...the fact of the universal existence of a body of basic rules of morality present in all society without distinction of race and culture has been established beyond doubt.”<sup>36</sup>*

Dengan demikian (sifanya yang universal), filsafat moral menjadi sumber ajaran praktis untuk mengembangkan model pendidikan moral yang berazas universal. Dalam kaitan dengan sifat universalnya, pendidikan moral dapat diterapkan secara universal dan bukan parsial, atas pertimbangan-pertimbangan partikularistik. Pengembangan pendidikan moral yang didasarkan pada azas universal dalam filsafat moral bertujuan untuk membahas tentang manusia secara universal.

*Ketiga*, filsafat moral membedakan tindakan dalam dua jenis, yakni *actus humanus* yang merupakan model tindakan dengan mengandaikan adanya partisipasi rasio yang berperan sebagai pengontrol tindakan manusia. Selain itu, *actus hominis* merupakan suatu model tindakan di mana manusia bertindak tanpa kesadaran (tanpa partisipasi rasio), sehingga tindakan ini digolongkan dalam model tindakan dalam level vegetatif dan sensibilibis. Dua model tindakan ini menjadi sangat urgen dalam pembahasan tentang pendidikan moral. Tujuan memberikan distingsi antara *actus humanus* dan *actus hominis* dalam konteks pendidikan moral adalah untuk mengembangkan pendidikan moral yang lebih holistik.

*Keempat*, filsafat moral mengajarkan bahwa, manusia sejatinya mencari kebahagiaan melalui nilai-nilai hidup. Pada tahap ini, muncul aliran-aliran yang membahas tentang nilai-nilai hidup, antara lain: Hedonisme yang dirumuskan oleh Aristippus dan kemudian dikembangkan oleh Epicurus bersamaan dengan teori fisika dari Demikritos. *Kedua*, Utilitarianisme yang lahir dari Hedonisme. Bapak aliran Utilitarianisme adalah Jeremy Bentham. Prinsip Bentham yang menjadi dasar dari aliran Utilitarianisem berbunyi: *“The greatest happiness of the greatest number.* Aliran ini kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill. *Ketiga*, Stoisisme yang menekankan hakikat dari kebajikan adalah *Self sufficiency.* Tokoh penting dalam aliran ini adalah Anthisthenes. Kemudian, pada era modern, tokoh terkenal seperti: Baruch Spinoza yang adalah tokoh panteis modern dan Immanuel Kant yang mencoba menjembatani gagasan stoisisme dan kaum Epicurus. Walaupun ini tidak tampak secara eksplisit, namun etika deontologis Kantian menekankan kewajiban moral (imperatif kategoris) sebagai kritik terhadap etika utilitarian yang menekankan hasil (konsekuensi tindakan) yang juga mencakupi sebanyak mungkin orang. Dari segi nilai, filsafat moral mengajukan diskursus penting dalam sejarah manusia dalam upaya mengembangkan dan

---

<sup>36</sup>W. Poespoprodjo, 14.

melihat horizon ‘baru’ bagi pendidikan moral agar mampu merumuskan nilai-nilai pendidikan yang universal. Nilai-nilai hidup yang menunjang kehidupan bersama dielaborasi oleh Jürgen Habermas dengan konsep *Lebenswelt* yang mengacu pada gagasan dan nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan manusia, sebagai bentuk rasionalisasi dunia (nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak).<sup>37</sup> Dengan demikian, nilai-nilai universal dapat menjadi tonggak bagi pengembangan pendidikan moral, agar nilai-nilai hidup dalam tatanan sosial tidak sekedar dipandang sebagai hal yang ‘absurd’ melainkan dipandang sebagai alat pengendali sosial.

*Kelima*, dari segi struktur tindakan. Aristoteles dalam bukunya, *Nicomachean Ethics* membedakan tindakan dari segi strukturnya terdiri atas dua jenis tindakan: yakni: berdasarkan kesengajaan (*voluntarity*) dan ketidaksengajaan (*involuntarity*). Basis analisis yang dikemukakan oleh Aristoteles ini berhubungan dengan konteks umum tindakan dalam ajaran filsafat moral, yakni *actus humanus* dan *actus hominis*. Kedua jenis tindakan ini dibedakan untuk menjelaskan posisi *ratio* sebagai kontrol tindakan yang melibatkan beberapa proses: pengetahuan moral (*moral sense*), membuat pertimbangan dan keputusan (*deliberation*) dan kemudian mengerucut pada tindakan yang benar-benar bermoral (*moral action*).<sup>38</sup> Dapat ditarik suatu ruang diskursus antara *voluntarity action* dan *involuntarity action*. Kedua-duanya mengandaikan bahwa, tindakan diuji berdasarkan ‘pengetahuan’ (*voluntarity*) dan ketidaktahuan (*involuntarity*). Tindakan yang berdasarkan pengetahuan belum tentu merupakan tindakan bermoral, begitupun sebaliknya: tindakan atas dasar ketidaktahuan juga bersifat indifferen. Sebagaimana filsafat moral menjelaskan ‘ketidaktahuan’ adalah suatu *privation of knowledge* di mana tercakup ketidaktahuan yang tanpa kesesatan dan ketidaktahuan yang tercakup bentuk-bentuk kesesatan. Untuk melengkapi pandangan Aristoteles, Hannah Arendt mengajukan konsep banalitas kejahatan di mana rutinitas tindakan kejahatan yang dilakukan membuat seseorang terjerumus dalam ‘ketidakberpikiran’ (*thoughtlessness*). Ia memberikan masukan bahwa kejahatan dilakukan bukan karena ketidaktahuan, melainkan Karena ketidakberpikiran.<sup>39</sup> Elaborasi lebih lanjut diungkapkan oleh Yaacov Lozowick yang menekankan tindakan kejahatan dari segi motif, yakni ketidakpedulian (*indifference*), egois (*selfishness*), berhati dingin (*heartlessness*) dan kehendak jahat (*malevolence*).<sup>40</sup>

Dari hasil diskursus-elaboratif dari beberapa filsuf ini mempunyai sumbangan bagi model pendidikan moral yang ideal. Pendidikan moral seharusnya dengan pendekatan sinergis mampu menjawab beberapa kebutuhan pokok yang telah diajukan oleh filsuf-filsuf

---

<sup>37</sup>Hardiman, 57.

<sup>38</sup>Hardiman, 216.

<sup>39</sup>Hardiman, 227.

<sup>40</sup>Hardiman, 229.

tersebut. Pendidikan moral harus memberikan pola pendidikan yang menjawab sekaligus melampaui ‘ketidaknormalan etis’; pendidikan moral harus mencakupi pengetahuan moral (Aristoteles), menjawab persoalan krisis berpikir (Arend) dan mampu memetakan motif-motif tindakan (Lozowick) sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang universal.

### **Urgensi Pendidikan Moral: Berpendidikan dan Berdigital Secara Etis**

Apa itu pendidikan moral? Secara konvensional, orang mengenal pendidikan moral sebagai upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral. Tapi, klasifikasi di atas terkesan membuat generalisasi terhadap pendidikan moral. Begitupun, ada banyak pendapat tentang pendidikan moral yang kemudian menciptakan ‘pluralisme makna’ pendidikan moral itu sendiri. Emile Durkheim, seorang tokoh sosial menjelaskan bahwa pendidikan moral adalah kegiatan mentransmisikan perilaku yang baik dan benar dalam suatu masyarakat kepada warga negaranya di masa depan.<sup>41</sup> Dalam pemahaman seperti ini, Durkheim menilai moral bukan dari segi agama, melainkan lebih luas, menyangkut dengan pandangan-pandangan moral universal yang dihidupi oleh masyarakat. Adapula pandangan tentang pendidikan moral dari sisi agama dan kebudayaan. Singkatnya, pendidikan moral merupakan sebuah *nomenklatur* untuk menggambarkan setiap usaha manusia untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral, baik dari sisi pendidikan formal-informal, struktur dan organisasi sosial, maupun dari sisi kebudayaan dan agama.

Lalu, apa tujuan pendidikan moral? Umumnya pendidikan moral bertujuan untuk membangun kesadaran (*conscience*), mendorong tindakan etis, menanamkan dan mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Muncul pertanyaan lagi; apakah urgensi dari pendidikan moral dan bagaimana peran diskursus filsafat moral dalam upaya mengembangkan pendidikan moral? Bertolak dari itu, pendidikan moral bersifat umum sekaligus partikular. Umum artinya, merujuk pada konsep kebaikan. Dan partikular dalam artian, setiap individu atau kebudayaan mempunyai konsep atau keyakinan tentang ‘kebaikan’ tersendiri. Maka, untuk mengantisipasi jatuhnya pendidikan moral pada relativisme moral; karena pengandaian kebenaran dan kebaikan yang majemuk (tergantung konteks tempat, kebudayaan agama tertentu), maka filsafat moral menetapkan prinsip-prinsip moral universal sebagai landasan fundamental bagi pengembangan pendidikan moral di era digital. Untuk itu, ada beberapa hal yang menjelaskan pentingnya pendidikan moral.

*Pertama*, karena moral adalah tatatan pengetahuan yang ‘dipelajari’ bukan dengan sendirinya, tertanam dan menjadi sempurna dalam diri manusia sejak lahir. Pendidikan

---

<sup>41</sup>Barry Chazan, *Principles and Pedagogies in Jewish* (Cham: Palgrave Macmillan, 2021): 25.

moral pertama-tama untuk mempelajari asumsi-asumsi filosofis dalam filsafat moral, mempelajari diskursus penting tentang filsafat moral (baik dari segi metode *apriori* dan *a posteriori*, dari segi nilai-nilai yang universal, dari segi tindakan dan struktur tindakan dan lain-lain), sehingga filsafat moral menjadi bagian penting yang memperkaya pendidikan moral. Sebagai elaborasi dari urgensi pendidikan moral, dikemukakan oleh Clarken, sebagaimana dikutip oleh Murtadlo dan Khobir. Ia menjelaskan bahwa, kecerdasan moral adalah hal yang kurang diminati dan kurang dipelajari jika dibandingkan dengan kecerdasan kognitif, emosional, dan sosial, ‘padahal’ kecerdasan moral mempunyai potensi besar dalam meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran dan perilaku.<sup>42</sup> Artinya, kecerdasan moral adalah milik semua orang yang harus dipelajari berdasarkan nilai moral universal bukan lokal atau partikular, sehingga dengan pendidikan moral, seseorang diarahkan untuk menjadi manusia yang baik. Konteks menjadi manusia yang baik menjadi hal paling fundamental dalam dunia pendidikan, sehingga peserta didik bukan hanya menjadi pengguna teknologi digital, melainkan menjadi manusia pengguna teknologi digital yang dilandasi dengan prinsip-prinsip moral (*moral principles*).

*Kedua*, sebagai lanjutan dari poin pertama (menjadi manusia yang baik), pendidikan moral secara normatif juga bertujuan untuk mengarahkan peserta didik bukan hanya sebagai ‘pengguna digital’, melainkan juga sebagai ‘warga digital’ (*digital citizenship*) yang benar-benar melek teknologi digital dan taat pada norma-norma umum yang berlaku di ‘ruang digital’. Karakteristik normatif pendidikan moral berakar dalam ajaran filsafat moral, yang termasuk dalam tataran moral objektif. Dapat dijelaskan bahwa, norma mengatur semua tindakan manusia, baik atas dasar kebebasan maupun tanggung jawab moral. Prinsip tertinggi norma moral adalah martabat manusia (*human dignity*). Keyakinan akan martabat manusia telah menjadi bagian dalam diskursus filsafat yang sangat ketat di era klasik. Sebagaimana Plato mengemukakan humanisme-dualistik yang memandang bahwa jiwa manusia bersifat immaterial dan luhur, sedangkan tubuh manusia bersifat material dan rendah. Akan tetapi, humanisme Plato kemudian dikritik dan dikembangkan oleh Aristoteles. Dalam prinsip metafisikanya, Aristoteles menolak dualisme antara ‘materi’ dan ‘forma (tubuh dan jiwa)’. Aristoteles menegaskan bahwa, manusia adalah kesatuan substansial antara jiwa dan tubuh; maka, Aristoteles memandang manusia secara holistik. Adapun jiwa manusia adalah jiwa rasional yang bernilai luhur, maka keberadaan manusia sebagai *ens* (substansia) bersifat ‘satu’ (*unum*), benar (*verum*) dan ‘indah’ (*pulchrum*); atau disebut oleh Aristoteles dengan sebutan ‘sifat-sifat metafisis’ manusia. Dengan ini, secara

---

<sup>42</sup>Muhammad Khasib Amin Murtadlo and Abdul Khobir, ‘Pendidikan Moral Pandangan Immanuel Kant’, *Jurnal Basicedu*, 7.4 (2023): 2225.

implisit dapat ditemukan bahwa, martabat manusia melekat dalam dirinya sebagai makhluk yang berakal budi (*anima rationale*).

Dalam perkembangan diskursus tentang martabat manusia, era *Renaissance* dan *Aufklärung* menyumbang perubahan besar yang kemudian berpuncak pada abad ke-20. Akhirnya, berkaca dari tragedi kemanusiaan Perang Dunia II dan peristiwa *Holocaust Universal Declaration of Human Right*, diadakan upaya penegakan martabat manusia melalui Deklarasi HAM secara global. Dari diskursus tentang martabat manusia, maka timbul pula diskursus tentang keadilan. Dalam pemahaman Immanuel Kant, keadilan adalah konsekuensi langsung dari martabat manusia dan karena itu, keduanya saling melekat. Hal ini juga tentu berdasar pada definisi keadilan dalam tradisi kekaisaran bangsa Romawi yang dipopulerkan oleh Domitius Ulpianus; ‘keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya’ (*suum cuique tribuere*). Aplikasi ‘keadilan’ dalam menggunakan teknologi digital dapat dipahami sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak merugikan orang lain dan bertujuan untuk kebaikan bersama (*bonum commune*). Karena itu, Hardiman memberikan penekanan khusus pada karakteristik normatif, yang disebut sebagai proses Juridifikasi (*Verrechtlichung*)<sup>43</sup> sebagai tujuan untuk menciptakan iklim ‘kedisiplinan’, sehingga pengguna teknologi digital didisiplinkan oleh norma-norma moral yang diajarkan dan menjadi ‘warganegara digital’.

*Ketiga*, sebagai lanjutan dari poin kedua (warga dunia digital), fungsi pendidikan moral untuk membongkar ketidaksadaran peserta didik dalam menggunakan dan menerapkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Dekonstruksi ketidaksadaran sebenarnya, sudah terungkap dalam beberapa anjuran dalam filsafat moral. Secara khusus, distingsi tindakan manusia *actus humanus* dan *actus hominis*, serta distingsi dari segi struktur tindakan seperti *voluntarity* dan *involuntarity*, menekankan pentingnya pendidikan moral agar peserta didik dapat membedakan dua jenis tindakan ini dan mampu menerapkannya secara bijaksana. Pertimbangan lebih lanjut, dalam filsafat moral dua bentuk tindakan ini terintegrasi dalam tataran moral subjektif, di mana ‘subjek’ adalah pihak yang berotonom dalam menentukan tindakan dan konsekuensi tindakan. Akhirnya, dekonstruksi ketidaksadaran dalam berdigital juga sebagai langkah preventif dalam pendidikan moral untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam konteks pendidikan berbasis teknologi digital, secara khusus bias kognitif “Efek Dunning-Kruger”; mengatasi persoalan nalar kritis yang berubah menjadi ‘nalar produksi dan konsumsi’, ‘nalar instant’ ‘nalar ketergantungan’, ‘nalar instrumentalis’ dan lain sebagainya.

---

<sup>43</sup>Hardiman, *Aku Klik maka Aku Ada Manusia dalam Revolusi Digital*, hal 56.

## KESIMPULAN

Persoalan pendidikan berbasis teknologi digital sangat-lah kompleks. Karena kompleksitas masalah, maka dibutuhkan diskursus kritis dari perspektif filsafat moral. Diskursus ini tidak hanya penting, melainkan mendesak; karena telah dibuktikan beberapa pendekatan pendidikan moral (pendidikan karakter), namun tidak efektif menyelesaikan masalah. Selain itu, filsafat moral urgen karena kerangka persoalan yang ditawarkan oleh digitalisasi pendidikan seputar tindakan dan keyakinan manusia akan kebaikan dan keburukan; yang secara kategorial merupakan wilayah kajian filsafat moral. Dalam hubungan dengan pendidikan moral, filsafat moral memberikan landasan dan orientasi agar pendidikan moral diterapkan menurut prinsip-prinsip moral universal.

Bertolak dari itu, tujuan utama artikel ini adalah membuktikan fungsi disipliner kajian filsafat moral dalam membina kesadaran peserta didik. Pertama-tama, persoalan kunci yang dibahas dalam artikel ini adalah ‘ketidaksadaran’. Arti ‘ketidaksadaran’ tidak seharusnya dipahami secara literal, melainkan dalam khazanah filosofis. Ketidaksadaran yang dimaksudkan adalah kondisi dimana peserta didik kehilangan daya kritis dalam menggunakan teknologi digital. Sebagaimana, digitalisasi menawarkan berbagai kemudahan melalui fitur-fitur baru seperti; kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang ditampilkan dengan berbagai bentuk (*Chat GPT, Deepseek, AI generative* dan lain-lain), maka dengan itu peserta didik terjebak dalam mentalitas *instant* yang kemudian membuat peserta didik tidak berpikir mengenai dengan etis atau tidaknya menerapkan kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Selain itu, ‘ketidaksadaran’ merupakan sebuah metafor baru dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana nalar kritis peserta didik berubah menjadi ‘nalar ketergantungan’ (addiktif), ‘nalar konsumtif’ (mengonsumsi informasi tanpa melibatkan daya kritis), ‘nalar produktif’ (memproduksi berita tanpa secara leluasa, tanpa syarat-syarat keilmuan yang sah). Sedangkan urgensi pendidikan moral adalah: mampu membina kesadaran peserta didik agar memahami hakikat kebaikan dan keburukan sebagai landasan tindakan; menjadi warga digital yang terikat dengan norma-norma penggunaan teknologi digital; dan terutama meningkatkan kesadaran pengguna dalam memahami fungsi dan kedudukan teknologi digital dalam dunia pendidikan agar tidak terjadi disorientasi fungsi teknologi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Ida Bagus Putu. “Filsafat Moral: Disequilibrium Citra dan Realita Etika Masyarakat Indonesia” (Studi Fenomenologi Penggunaan Media Sosial Instagram).” *Sanjivani: Jurnal Filsafat* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.25078/sjf.v12i2.2625>.
- Adzfar, Zainul, dan Badrul Munir Chair. “Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah.” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.12596>.

- Anggraeni, Sri. “Sejarah Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0.” *Materials Performance and Characterization* 8, no. 3 (2019): 2. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17436.51847>.
- Baiduri, Ahmad. “Political Post-Truth: Antara Simulacra dan Prahara Digital.” *LSF Discourse*, 2023. <https://lsfdiscourse.org/political-post-truth-antara-simulacra-dan-prahara-digital/>.
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani Dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: PT Kanisius, 1999.
- Breakey, Hugh. “Why Moral Education should Involve Moral Philosophy.” *The Conversation*, 2014. <https://theconversation.com/why-moral-education-should-involve-moral-philosophy-31675>.
- Chazan, Barry. *Principles and Pedagogies in Jewish*. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.
- Dingot H. Ismail dan Joko Nugroho. “Kompetensi Kerja Gen Z di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2022): 1300. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.566>.
- Fajariah, Mutiarawati, dan Sryo Djoko. “Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760-1830.” *HISTORLA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (2020): 77. <https://doi.org/10.24127/hj.v8i1.2214>.
- Gunawan, A. Setiardi. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius, 1990.
- Hardiman, F. Budi. *Aku Klik maka Aku Ada Manusia dalam Revolusi Digital*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Hayes, Adam. “Dunning-Kruger Effect: Meaning and Examples in Finance.” *Investopedia*, 2023. <https://www.investopedia.com/dunning-kruger-effect-7368715>.
- Hendrastomo, Grendi, dan Nur Endah Januarti. “The Characteristics of Generation Z Students and Implications for Future Learning Methods.” *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 9, no. 2 (2023): 484. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i2.7745>.
- Hunter, Michael. “Royal Society (of London for Improving Natural Knowledge) Summary.” *Britannica*, 2024. <https://www.britannica.com/topic/Royal-Society>.
- Isma, Cut Nelga, Rina Rahmi, dan Hanifuddin Jamin. “Urgensi Digitalisasi Pendidikan Sekolah.” *At-Ta’Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2022): 129–41. <https://doi.org/10.47498/tadib.v14i2.1317>.
- Lase, Delipiter. “Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Sunderman* 1, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.53091/jtir.v1i1.17>.
- Masut, Vinsensius R., Robertus Wijanarko, dan Pius Pandor. “Objektivikasi Subjek dalam Budaya Kontemporer berdasarkan Konsep Hiperrealitas Jean Baudrillard.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 303–15. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59000>.

- Maulida, Lely, dan Reska K Nistanto. “Asal-Usul Luddite, Istilah Buat Orang yang anti Teknologi.” Kompas.Com, 2023.  
<https://tekno.kompas.com/read/2023/01/16/10000017/asal-usul-luddite-istilah-buat-orang-yang-anti-teknologi>.
- Murtadlo, Muhammad Khasib Amin, dan Abdul Khobir. “Pendidikan Moral Pandangan Immanuel Kant.” *Jurnal Basicedu* 7, no. 4 (2023).  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i4.5371>.
- Noviani, Dwi, Mustafyanti, Zaimuddin, Aidah, dan Hilmin. “Sosialisasi Urgensi Pendidikan Karakter Terhadap Remaja Millennial Generasi Z di Era Society 5.0.” *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 119.
- Pinangkaan, Allesandro. “Pentingnya Tahap Perencanaan dalam Manajemen Fasilitas Pendidikan Berbasis Revolusi Industri 4.0.” In *Teori dan Model Manajemen Pendidikan*, 1–16, 2019.
- Poespoprodjo, W. *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Pustaka Grafika, 1998.
- Sarkar, Soumik. “A Brief History of Online Education.” Adamas University Pursue Excellence, 2020. <https://adamasuniversity.ac.in/a-brief-history-of-online-education/>.
- Subandowo, Marianus. “Teknologi Pendidikan di Era Society 5.0.” *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 24.
- Suseno, Franz Magnis. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wibowo, A. Setyo, ed. *Cara Kerja Ilmu Filsafat dan Filsafat Ilmu Dari Dialektika ke Dekonstruksi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023.